BAB III

KONDISI OBYEKTIF

A. Perkembangan Undang-Undang Kewarisan Di Indonesia

Sebagai salah satu badan peradilan, Peradilan Agama mempunyai sejarah panjang dan berliku-liku. Sejarah panjang Peradilan Agama itu banyak dicoraki oleh politik Islam Pemerintah Hindia Belanda sebagai Pemerintah Kolonial, maupun Pemerintah Republik Indonesia di masa kemerdekaan. Terutama disebabkan oleh politik Islam Pemerintah Hindia Belanda yang kemudian tetap dibiarkan berlanjut oleh Pemerintah Republik Indonesia, banyak keruwetan yang dihadapi oleh Peradilan Agama. Keruwetan yang melingkupi Peradilan Agama itu misalnya terletak pada:

- a. Kewenangan atau kompetensinya.
- b. Hukum acara atau hukum formilnya.
- c. Hukum materil atau hukum terapannya.

Sebagai dari keruwetan tersebut telah pupus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Meskipun dalam batas-batas tertentu masih dapat dipersoalkan, tetapi keruwetan tentang kewenangan atau kompetensi dan hukum acara Peradilan Agama pupus dengan lahirnya undang-undang tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Rosda 1997), h.25

Persoalan yang kemudian dihadapi oleh Peradilan Agama adalah tentang hukum materiil atau hukum terapan, yakni hukum positif yang harus diterapkan oleh Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan kepadanya. Hukum materiil yang diterapkan di Peradilan Agama adalah hukum Islam. Inilah yang dimaksudkan oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, M. Yahya Harahap, bahwa salah satu asas Peradilan Agama adalah asas personalitas keislaman. Yang dimaksud dengan asas personalitas keislaman adalah yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Persoalannya adalah ada sementara orang, termasuk Hakim Peradilan Agama menyamakan *syari'ah* dengan *fiqih*. Karena ada Hakim yang berpandangan demikian, maka dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, mereka merujuk kepada kitab-kitab fiqih. Akibatnya, tidak bisa tidak, rujukan mereka tentu kitab-kitab fiqih para pendukung mazhab. Dengan demikian, segera dapat diterka lahirnya berbagai putusan Peradilan Agama yang berbeda-beda untuk perkara yang sama (*berdisparitas*).

Perbedaan-perbedaan pendapat di antara para *fuqaha* yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih pegangan Hakim Peradilan Agama tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan sikap antipasti masyarakat pencari keadilan terhadap Peradilan Agama. Selain itu, di masa yang lalu, wawasan para Hakim Peradilan Agama mengenai fiqih Islam di Indonesia masih terpaku pada hukum yang terdapat dalam

mazhab Syafi'i. jika hal ini terus-menerus berlangsung, kepercayaan masyarakat untuk mencari keadilan berdasarkan hukum Islam ke Peradilan Agama lama-kelamaan akan menyusut, bahkan bukan tidak mungkin akan sirna. Logikanya hal yang demikian itu harus dihindarkan. Jawaban untuk mengatasi persoalan itu sudah jelas, yaitu harus ada hukum yang dijadikan pedoman bagi Hakim Peradilan Agama dalam membuat keputusan.

Pada saat ini masyarakat Islam Indonesia hanya memiliki kitab-kitab fiqh. Umat Islam baru memiliki abstraksi hukum Islam. Kitab-kitab fiqh tersebut bukan merupakan hukum positif, atau setidaknya belum merupakan hukum positif. Sekalipun umat Islam memiliki Al-Qur'an dan As-Sunnah, berarti bahwa umat Islam memiliki hukum Islam positif. Dalam kaitan ini Fazrul Rahman berkata: "Al-Qur'an sendiri bukan undang-undang, melainkan kitab yang berisi ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuk Allah untuk kepentingan umat manusia."⁴⁵

Sebagaimana telah disinggung, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan Peradilan telah kokoh. Secara hukum kedudukannya sudah tidak dipersoalkan lagi. Akan tetapi, ironisnya di sisi lain ia tidak mempunyai hukum materiil atau hukum terapan yang unikatif. Keadaan yang demikian ini tentu saja tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Untuk mengatasi persoalan ini, Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai hukum positif yang diperlukan untuk landasan rujukan setiap keputusan Peradilan Agama.

⁴⁵ Ibid, h.26

Menurut M. Yahya Harahap, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu jalan pintas. Sebab, sesungguhnya untuk melengkapi hukum materiil yang berlaku bagi Peradilan Agama, sebaiknya ditempuh jalur formal sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, untuk masa sekarang ini, segera dapat dibayangkan jalan panjang berliku-liku yang harus dilalui untuk menghasilkan hukum materiil yang demikian itu. Ditambah kendala yang bersifat emosional yang biasanya sangat reaktif terhadap keharusan adanya undang-undang yang khusus berlaku bagi orang Islam, maka kehadiran Kompilasi Hukum Islam, untuk sementara waktu, dapat dimengerti. Singkatnya, dikaitkan dengan kebutuhan yang mendesak tentang adanya hukum materiil untuk Peradilan Agama, bentuk undang-undang untuk kebutuhan tersebut belum mungkin. Dalam kaitan ini, Taufiq, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, menegaskan bahwa penggunaan undang-undang untuk hal tersebut adalah tepat sekali, tetapi mengingat kondisi dan waktu, hal ini belum mungkin. Penggunaan Keputusan Presiden dianggap kurang tepat, maka alternatif yang dipilih adalah penggunaan bentuk instruksi Presiden. Alternatif terakhir ini merupakan hasil kajian antara Mahkamah Agung, Departemen Agama, Sekretariat Negara dan beberapa pakar hukum. Akhirnya, lahirlah instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pada pokoknya instruksi Presiden ini berisi instruksi Presiden

kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:⁴⁶

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan.
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- c. Buku III tentang Perwakafan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 itu, Menteri Agama membuat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Keputusan Menteri Agama itu berisi:⁴⁷

Pertama

Seluruh instansi Departemen Agama dan instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Kedua

Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam dictum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Perkawinan, Kewarisan, dan

⁴⁶ Ibid, h.27

⁴⁷ Ibid, h.28

Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketiga

Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.

Keempat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Kompilasi Hukum Islam yang dikemas dalam bentuk Instruksi Presiden tidak termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1968 *juncto* Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 *juncto* Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam juga tidak memiliki salah satu ciri peraturan perundang-undangan, yaitu tentang paksaan berlakunya. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tidak sama dengan berlakunya peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari dictum kedua Keputusan Menteri Agama tersebut, yakni dengan adanya frase “sedapat mungkin.” Meskipun demikian keadaannya, Kompilasi Hukum Islam mendorong terpenuhinya kebutuhan akan Hukum Islam di Indonesia dalam sistem hukum nasional. Dalam makna yang positif, ia merupakan “tidak ada rotan akar pun jadi.”

B. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Upaya untuk mendekatkan orang Islam dengan keislamannya terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya mendekatkan orang Islam dengan keislamannya adalah mendekatkan orang Islam dengan hukum Islam. Salah satu bidang hukum Islam yang telah lama diupayakan agar dapat dijalankan (diterapkan) oleh orang-orang Islam di Indonesia adalah bidang hukum kewarisan. Di dalam tata hukum Indonesia, berlakunya bidang-bidang hukum Islam bagi orang Islam berlain-lainan. Di sini diambil contoh berlakunya hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam bagi orang Islam. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan perkawinan menurut hukum perkawinan Islam. Sementara itu, orang Islam yang akan membagi warisan tidak harus tunduk pada ketentuan-ketentuan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hal ini diantaranya didasarkan pada Pasal 49 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 49 ayat (1) menegaskan tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama. Pasal ini berbunyi:⁴⁸

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

⁴⁸ Ibid, h.29

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan Shadaqah.”

Di dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut. Bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

Jika Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dihubungkan dengan penjelasan undang-undang itu, maka diperoleh kesimpulan bahwa menurut hukum positif (tata hukum) Indonesia, orang Islam tidak harus tunduk pada hukum kewarisan Islam apabila mereka hendak membagi warisan. Orang Islam boleh menggunakan pranata hukum lain (misalnya hukum kewarisan adat atau hukum kewarisan berdasarkan KUH Perdata apabila hendak membagi warisan).⁴⁹

Adanya kenyataan sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan analisis yang mendalam mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia mempunyai *urgensi* yang menonjol. Telah lama Profesor Hazairin, Sajuti

⁴⁹ Ibid, h.30

Thalib, Profesor Mohammad Daud Ali, dan beberapa ahli hukum lainnya berupaya menggali hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan masyarakat Islam di Indonesia. Di antara berbagai pendapat oleh beberapa ahli hukum itu, pendapat Profesor Hazairin tentang dikenalnya pranata penggantian tempat (*plaatsvervulling*) di dalam hukum kewarisan Islam merupakan pendapat yang monumental. Secara prinsip pendapat beliau ini tertuang dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Semakin diterima dan meluasnya pendapat bahwa baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah menghendaki sistem bilateral di bidang kewarisan, menyebabkan ada pembaruan yang cukup menonjol dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama jika dibandingkan dengan sistem kewarisan yang dikembangkan oleh *ahlussunnah*. Cerminan asas bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Pasal 174 Ayat (2) yang berbunyi "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda." Kalimat pendek dalam pasal ini mengakhiri polemic panjang tentang apakah anak perempuan dapat *menghijab* (menghalangi) saudara pewaris atau tidak. Sistem kewarisan yang dikembangkan *ahlussunnah* menegaskan bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat *menghijab* saudara pewaris.⁵⁰

Konsekuensi berikutnya dari diterimanya asas bilateral adalah dikenalnya pranata penggantian tempat (*plaatsvervulling*) di dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana di atas telah disinggung (hal ini

⁵⁰ Ibid, h.31

akan dirinci lebih lanjut di dalam bab II). Menurut sistem kewarisan yang dikembangkan oleh *ahlussunnah*, ada perbedaan yang sangat menonjol antara kedudukan cucu (dan ahli waris dalam garis lurus ke bawah lainnya) dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan. Dua jenis cucu ini tidak mungkin mewaris bersama-sama, sebab cucu dari anak laki-laki *menghijab* cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris *dzul faraid* atau *ashabah*, sedangkan cucu dari anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris *dzul arham*. Ketentuannya adalah bahwa ahli waris *dzul arham* baru mewaris apabila tidak ada ahli waris *dzul faraid* atau *ashabah*.⁵¹

Di dalam bab II dan selanjutnya akan diuraikan tentang pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang dibawa oleh Kompilasi Hukum Islam. Untuk memperoleh gambaran tentang letak pembaruan tersebut, disertai pada gambaran sistem kewarisan yang dikembangkan oleh *ahlussunnah*.

Dalam perkembangan selanjutnya, dewasa ini Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ini kemudian mengalami perubahan pada Pasal-Pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan yang ada maupun dengan kebutuhan di lapangan praktis dengan keluarnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.⁵²

⁵¹ Ibid, h.32

⁵² [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29466/4/Chapter I.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29466/4/Chapter%20I.pdf)/ Judul-Skripsi-Analisis-Hukum-Putusan-Pengadilan-Agama-Yang-Memutuskan-Sertifikat-Hak-Milik-Atas-Tanah-Tidak-Berkekuatan-Hukum, Diakses Tanggal 24 Februari 2015, 2

Tugas dan kewenangan Peradilan menurut Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Kewenangan Peradilan Agama tersebut berdasar atas asas personalitas ke-Islaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yang meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Salah satu sentral dalam Undang-Undang ini adalah asas personalitas ke-Islaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan perkataan lain, dalam hal terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Jadi, luas jangkauan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditinjau dari subjek pihak yang berpekar, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa terkecuali.⁵³

⁵³ Ibid, 3

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo.

Lembaga Peradilan dalam menjalankan kekuasaannya, pastilah mempunyai kompetensi atau kekuasaan. Kata “kekuasaan” sering disebut dengan istilah kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda *Competentie* yang kadang diartikan dengan kewenangan atau kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan Peradilan adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu: kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut⁵⁴

1. Kekuasaan Relatif.

Kekuasaan Relatif adalah pembagian kekuasaan antara pengadilan agama berdasarkan wilayah hukum. Kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam pembedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenisnya dan sama tingkatannya.⁵⁵ Misalnya, Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Pengadilan Agama Mojokerto sama-sama satu tingkatan. Pengadilan Agama Sidoarjo adalah pengadilan tingkat pertama yang kedudukannya berada di Kota Kabupaten, yaitu Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006. “Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota”. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) disebutkan pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di kota madya atau kabupaten, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

⁵⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.138.

⁵⁵ A. Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.44.

2. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut, yakni kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan.⁵⁶ Kekuasaan mengadili yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan Agama tersebut menjadi kekuasaan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Kompetensi Pengadilan Agama didasarkan pada “*asas keislaman*” yang juga disebut dengan “*asas personalitas keislaman*”. Dengan demikian memahami asas personalitas secara benar dan tepat ini menjadi penting, karena menjadi tolak ukur penentuan kekuasaan absolut kekuasaan pengadilan agama. Penerapan asas personalitas keislaman ini harus diletakkan pada substansi dan bukan pada para pihak yang berperkara. Karena pada hakikatnya substansi perkara inilah yang dilimpahkan kepada pengadilan agama untuk diperiksa dan diadili atau diputuskan dan karenanya menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.⁵⁷

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sama dengan kekuasaan pengadilan agama di seluruh Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 1, 2, 49 dan Penjelasan Umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain: Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Inpres No. 1

⁵⁶ Raihan, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h.25

⁵⁷ Ibid, h.30

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, semuanya ini harus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 berarti mengakhiri pluralisme peraturan peradilan agama tersebut. Fungsi dan struktur susunan kekuasaan peradilan agama disempurnakan dan ditegakkan tanpa campur tangan peradilan umum. Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menjelaskan Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung yang sering dikenal dengan peradilan satu atap.

Dalam menjalankan tugasnya Pengadilan Agama Sidoarjo dikelola 37 orang karyawan yang terdiri dari unsur : Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, Panitera dan Karyawan lainnya. Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut : Ketua dan Wakil Ketua Drs. M. Asymuni, M,H. dan Drs. H, A. Nurul huda, M,H. Hakim sebagai pelaksana fungsional teknis Pengadilan Agama yaitu Dra. Emi suyati, Drs. Mutakin, Drs. Jureimi arief, Mukhtar, S,Ag, Siti aisyah, S,Ag, Dra. Hj chulailah, H, M. Sholik fatchurizi, S.H., H, Suhartono, S,Ag. S.H. M.H. Kepaniteraan yang diemban oleh seorang panitera yang juga merangkap sebagai sekretaris, yaitu: H. Sriwaluyo, S.H. Dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh Wakil Panitera Hj. Nurul islah, S.H, Wakil Sekretaris Khoiruddin, S.H Panitera Muda yang terdiri

dari Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Permohonan Dra. Siti Juwariyah Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Gugatan Muhammad fachruddin, S.H, M.H. Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Hukum Dra. Bibit Nur Rohyani. Beberapa Orang Kaur terdiri dari Kaur Kepegawaian Fifit fitri, S.H, M.H, Kaur Keuangan Aris dwisutiyono, S.T , Kaur Umum Heru susanto, S.H.I. Kelompok Fungsional Kepegawaian terdiri dari Beberapa Panitera Pengganti Masfi handani, S.H, Ahmad zainuddin, S.H, M. Dedikurniawan, S.H. Beberapa Juru Sita Pengganti Ninik sa'ada, S.S.i, Dwi herna sari, S.H, dan M. alisaid, S.H.I⁵⁸

D. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Mengenai Kewarisan Perkara Nomor: (2917 Tahun 2014)

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta kewarisan perkara nomor 2917 tahun 2014 di bagi tiga bagian yaitu⁵⁹ :

1. Pokok Permasalahan dalam Pembagian Waris Perkara Nomor 2917 tahun 2014
 - a. Adanya dugaan Tergugat tidak mau membagi harta warisan kepada semua ahli waris yang masih hidup sesuai dengan hukum agama Islam (al-faraid) dan ketentuan hukum yang berlaku yakni berupa sebuah rumah.
 - b. Adanya dugaan Tergugat telah mempunyai I'tikad yang tidak baik

⁵⁸ Diambil dari dokumentasi Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Juni 2015

⁵⁹ Diambil dari dokumentasi Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 4 Maret 2015

terhadap Penggugat.

2. Hasil Putusan Pembagian Waris Perkara Nomor 2917 tahun 2014

Pengadilan Agama berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan memutuskan perkara-perkara dalam bidang hukum keluarga dan harta waris bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam.⁶⁰ Adapun hasil keputusan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara Nomor 2917 tahun 2014 PA.Sda. adalah sebagai berikut⁶¹ :

- a. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan Para penggugat dengan verstek
- c. Menetapkan ahli waris dari Agus Salim, SE., Bin Rohani Suroso adalah Penggugat I, penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Tergugat.
- d. Menyatakan bahwa harta berupa rumah dan tanah yang terletak Perum Mutiara Citra Asri Blok O2 No. 24, sertifikat hak guna bangunan nomor 254, Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Tipe 36, dengan Luas Tanah : 153 m², atas nama Agus Salim, SE dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah Ibu Nine Hariyanintah
 - Sebelah Selatan : rumah Bapak Tatang

⁶⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 2

⁶¹ *Putusan No.1884/Pdt.G/2014/PA.Sda.*

- Sebelah Barat : rumah Ibu Kesih
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan

Adalah harta warisan (Tirkah) dari Agus Salim SE., Bin Rohani Suroso yang harus dibagi kepada ahli waris sebagaimana amar nomor 3 diatas.

- e. Menyatakan bagian ahli waris Agus Salim atas harta peninggalan (tirkah) sebagaimana amar putusan angka 4 adalah:
 - 5.1 Ibu / Penggugat memperoleh 16/96 bagian.
 - 5.2 Istri / Tergugat memperoleh 24/96 bagian.
 - 5.3 Saudara Perempuan / Penggugat II memperoleh 7/96 bagian
 - 5.4 Saudara Laki-Laki / Penggugat III memperoleh 14/96 bagian
 - 5.5 Saudara Laki-Laki / Penggugat IV memperoleh 14/96 bagian
 - 5.6 Saudara Perempuan / Penggugat V memperoleh 7/96 bagian
 - 5.7 Saudara Laki-Laki / Penggugat VI memperoleh 14/96 bagian
- f. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai rumah dan tanah warisan tersebut dengan tidak mau membagi warisan kepada ahli waris adalah perbuatan melawan hukum.
- g. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tirkah dari Agus Salim, SE., Bin Rohani Suroso Kepada pada Penggugat berdasarkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagaimana amar putusan angka 4 dan jika tidak dapat dibagi secara in natura maka tirkah tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada para penggugat dan tergugat menurut bagiannya masing-masing

berdasarkan amar angka 4 diatas.

- h. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo sebagaimana berita acara sita Nomor 2917/Pgt.G/2014/ PA.Sda. Tanggal 17 Desember 2014 adalah sah dan berharga.
 - i. Menolak gugatan Para penggugat selain dan selebihnya.
 - j. Membebankan kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.356.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
3. Alasan Hakim dalam Memutuskan Pembagia Waris Perkara Nomor 2917 tahun 2014
- Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Pembagian Waris adalah :
- a. Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan para Penggugat, telah terbukti bahwa harta peninggalan Agus Salim, SE bin Rohani Suroso dikuasai oleh Tergugat dan selama kurang lebih 3 bulan dalam keadaan kosong/terkunci, sedangkan berdasarkan azas Hukum Islam kewarisan adalah bersifat ijbari, artinya seketika pewaris wafat maka saat itu hartanya menjadi hak para ahli waris.
 - b. Tergugat yang telah menguasai obyek secara sepihak dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian para Penggugat.